LAPORAN HASIL ASESMEN MANGROVE DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MEI 2024

Judul Program :

Mendorong Rencana Intervensi Implementasi Kebijakan NDC di Ekosistem Semenanjung Kampar – Kerumutan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Tim Asesmen :

Susanto Kurniawan
Adfan Darlis
Tedi Boy

Pendahuluan

- Latar belakang

  Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi GRK dari sektor FOLU. Dalam kaitan dengan ini, pemerintah provinsi telah menyusun rencana kerja Provinsi Riau untuk FOLU NET SINK 2030. Sejalan dengan ini, komitmen project di Provinsi Riau akan mengawal perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Semenanjung Kampar dan Ekosistem Kerumutan tahun 2023 yang lalu, Perkumpulan Elang bersama Paradigma telah menginisasi pertemuan 2 kabupaten (Siak dan Pelalawan) untuk komitmen dan dukungan dalam pencapaian folu net sink di Indonesia.

  Pasca dukungan 2 kabupaten di atas (Siak dan Pelalawan), project mendorong rencana implementasi Kabupaten Indragiri Hilir di Ekosistem Kerumutan untuk kebijakan kaitan dengan NDC di Indonesia. Ekosistem mangrove memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan, baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya. Mangrove berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi biota laut, tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya. Mangrove juga berperan dalam menjaga garis pantai dari abrasi, menghalangi intrusi air laut, dan menyerap karbon yang berkontribusi dalam memitigasi perubahan iklim. Selain itu, mangrove merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut.

  Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau yang memiliki ekosistem mangrove yang cukup luas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ekosistem mangrove di wilayah ini mengalami tekanan dan ancaman akibat aktivitas manusia, seperti konversi lahan untuk pertambakan, pemukiman, dan industri, serta pencemaran lingkungan. Kerusakan ekosistem mangrove dapat mengancam keberlangsungan sumber daya hayati laut dan kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem tersebut.

  Karena itu, penting untuk melakukan asesmen terhadap kondisi terkini ekosistem mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir. Asesmen ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait luasan, sebaran, kondisi ekosistem, jenis-jenis mangrove, serta manfaat dan ancaman yang dihadapi. Hasil asesmen ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pengelolaan dan konservasi ekosistem mangrove yang berkelanjutan di wilayah ini.

- **Tujuan Asesmen**

  Tujuan dari asesmen ekosistem mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

  a) Mengidentifikasi luasan dan sebaran ekosistem mangrove di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
  b) Mengevaluasi kondisi ekosistem mangrove, meliputi tutupan, kerapatan, dan kesehatan mangrove.
  c) Menginventarisasi jenis-jenis mangrove yang terdapat di wilayah kajian.

d) Menganalisis manfaat ekosistem mangrove bagi masyarakat dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya.
e) Mengidentifikasi permasalahan dan ancaman yang dihadapi oleh ekosistem mangrove di wilayah kajian.
f) Merumuskan rekomendasi strategi pengelolaan dan konservasi ekosistem mangrove yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
g) Menyediakan data dan informasi terkini mengenai kondisi ekosistem mangrove sebagai dasar bagi pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.

- **Lokasi Asesmen**

Lokasi Asesmen

Asesmen ekosistem mangrove dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 339,5 Km yang membentang dari Kecamatan Tanah Merah di bagian utara hingga Kecamatan Gaung Anak Serka di bagian selatan. Wilayah asesmen meliputi beberapa kecamatan yang memiliki ekosistem mangrove, antara lain:

a Kecamatan Tanah Merah
b Kecamatan Kuala Indragiri
c Kecamatan Mandah

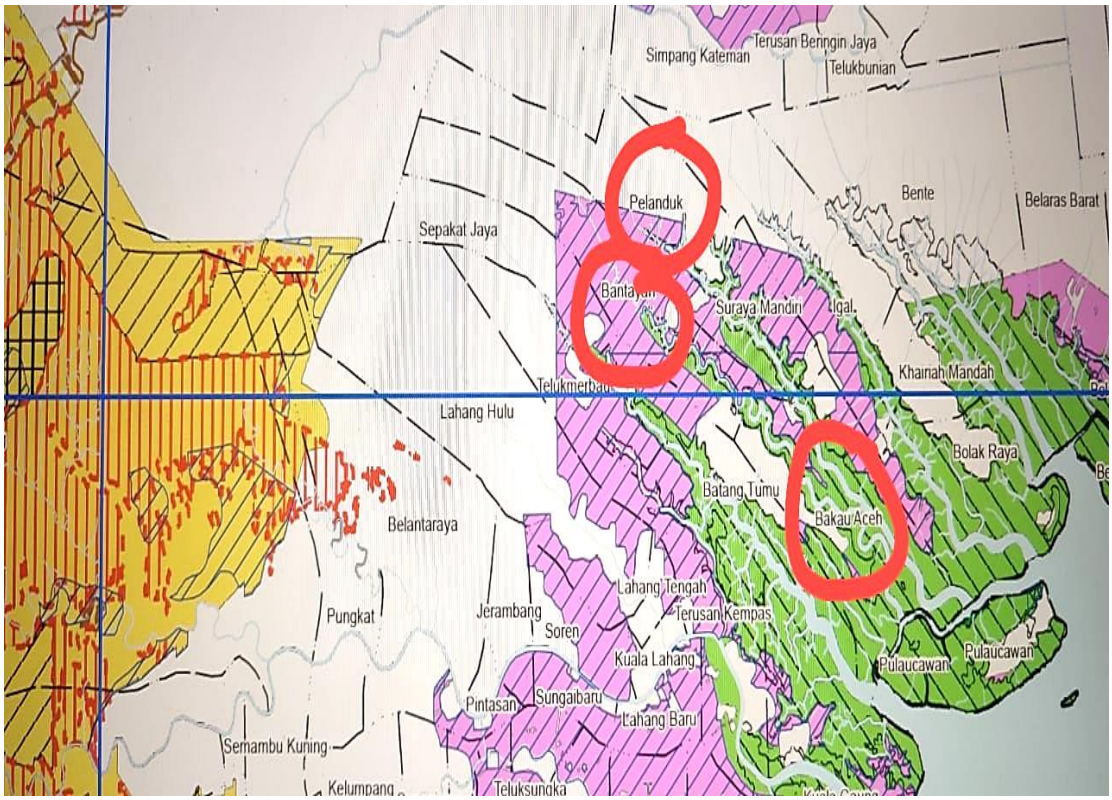

Lokasi-lokasi asesmen tersebut dipilih berdasarkan data awal mengenai keberadaan ekosistem mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan aksesibilitas, serta keterwakilan kondisi ekosistem mangrove di wilayah tersebut.

Peta Desa-desa lokasi asesmen ekosistem mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Gambar berikut :

Desa Bakau Aceh

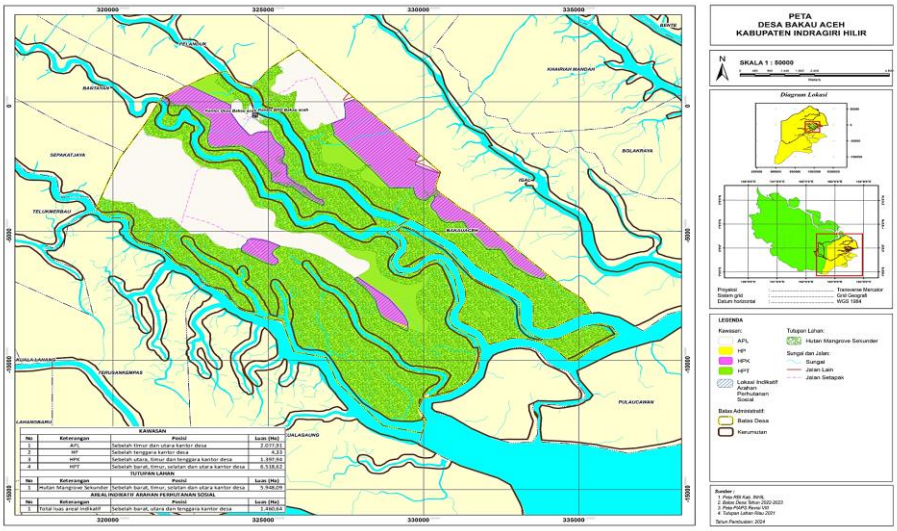

Desa Bantayan

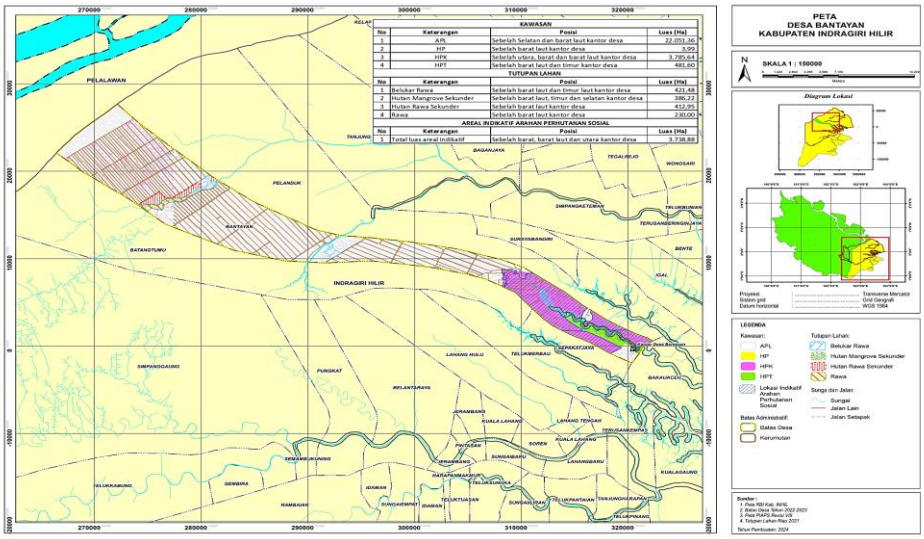

Desa Pelanduk

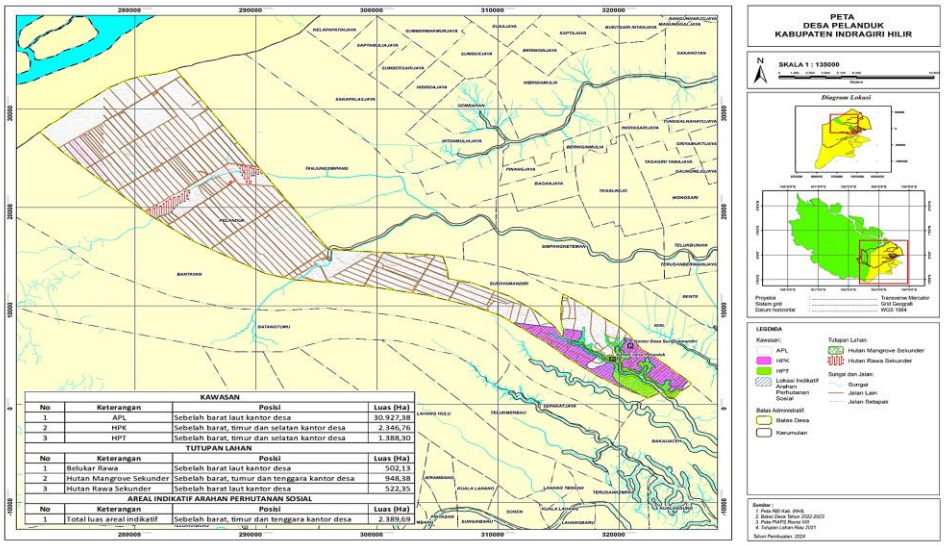

Desa Sungai Buluh

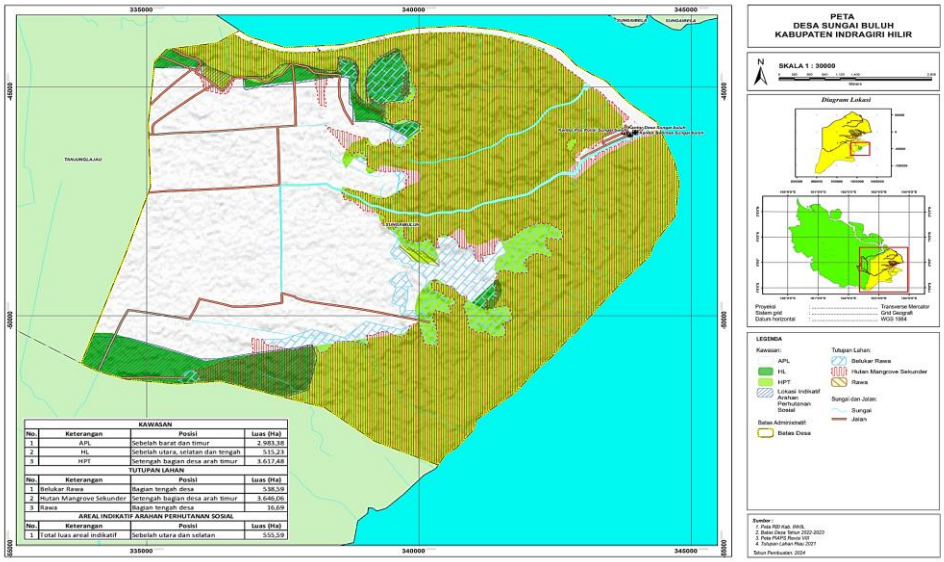

KAWASAN			
No.	Keterangan	Posisi	Luas (Ha)
1	APL	Sebelah barat dan timur	2.983,38
2	HL	Sebelah utara, selatan dan tengah	515,23
3	HPT	Setengah bagian desa arah timur	3.617,48
TUTUPAN LAHAN			
No.	Keterangan	Posisi	Luas (Ha)
1	Belukar Rawa	Bagian tengah desa	5.38,59
2	Hutan Mangrove Sekunder	Setengah bagian desa arah timur	3.646,06
3	Rawa	Bagian tengah desa	16,69
AREAL INDIKATIF ARAHAN PERHUTANAN SOSIAL			
No.	Keterangan	Posisi	Luas (Ha)
1	Total luas areal indikatif	Sebelah utara dan selatan	555,59

Desa Sungai Pinang

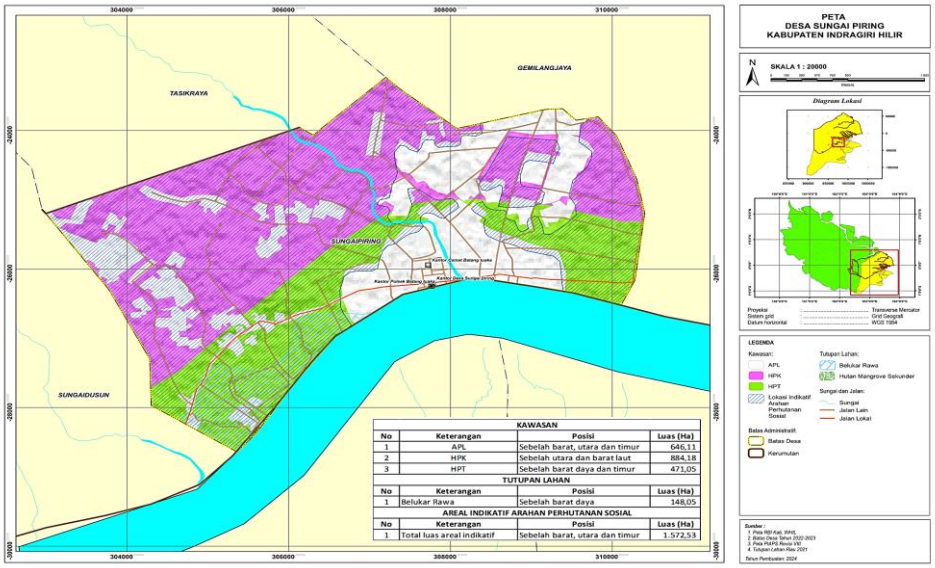

KAWASAN			
No	Keterangan	Posisi	Luas (Ha)
1	APL	Sebelah barat, utara dan timur	646,11
2	HPK	Sebelah utara dan barat laut	884,18
3	HPT	Sebelah barat daya dan timur	471,05
TUTUPAN LAHAN			
No	Keterangan	Posisi	Luas (Ha)
1	Belukar Rawa	Sebelah barat daya	148,05
AREAL INDIKATIF ARAHAN PERHUTANAN SOSIAL			
No	Keterangan	Posisi	Luas (Ha)
1	Total luas areal indikatif	Sebelah barat, utara dan timur	1.572,53

Desa Tanjung Lajau

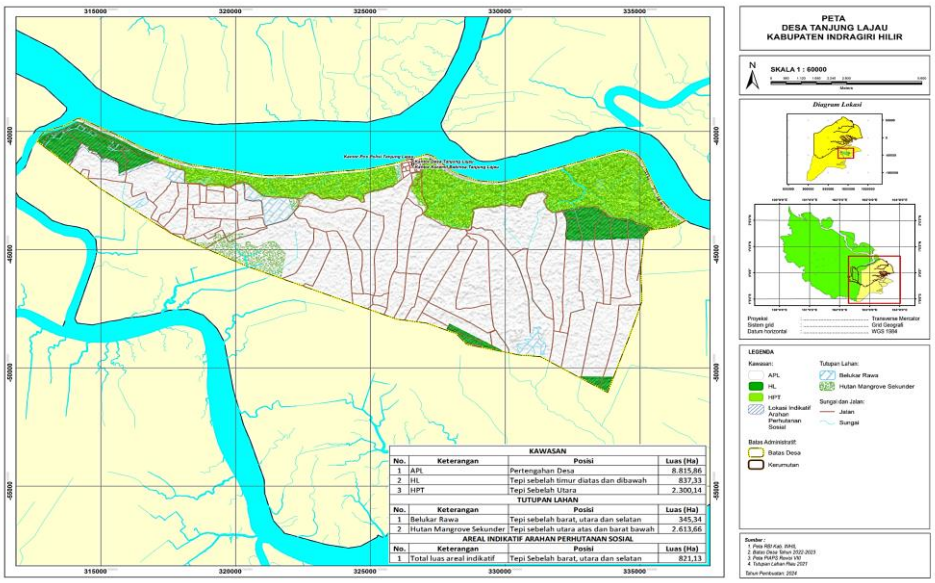

KAWASAN			
No.	Keterangan	Posisi	Luas (Ha)
1	APL	Pertengahan Desa	8.815,86
2	HL	Tepi sebelah timur diatas dan dibawah	837,33
3	HPT	Tepi Sebelah Utara	2.300,14
TUTUPAN LAHAN			
No.	Keterangan	Posisi	Luas (Ha)
1	Belukar Rawa	Tepi sebelah barat, utara dan selatan	345,34
2	Hutan Mangrove Sekunder	Tepi sebelah utara atas dan barat bawah	2.613,66
AREAL INDIKATIF ARAHAN PERHUTANAN SOSIAL			
No.	Keterangan	Posisi	Luas (Ha)
1	Total luas areal indikatif	Tepi Sebelah barat, utara dan selatan	821,13

Melalui asesmen di lokasi-lokasi tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi terkini ekosistem mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.

Metodologi

- Waktu dan periode asesmen, dilaksanakan pada Bulan Mei 2024
- Metode pengumpulan data (observasi lapangan, wawancara, studi literatur, dan lainnya)
- Analisis data yang digunakan

Gambaran Umum Wilayah

- **Kondisi geografis**

  Kabupaten Indragiri Hilir terletak di wilayah pesisir timur Pulau Sumatera, Provinsi Riau. Secara geografis, Kabupaten Indragiri Hilir membentang dari 0°36' Lintang Utara sampai 1°07' Lintang Selatan dan dari 102°48' Bujur Timur sampai 103°28' Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan:

  Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak
  Sebelah Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
  Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi
  Sebelah Timur : Selat Malaka

  Secara umum wilayah Kabupaten Indragiri Hilir luasnya mencapai 11.605,97 km2 terdiri dari daratan seluas lebih kurang 8.838,07 km2 dan lautan seluas lebih kurang 2.767,90 km2. Wilayah Negeri Seribu Parit ini beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.000-3.000 mm per tahunnya.

  Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 meter di atas permukaan laut (MDPL). Kabupaten ini dilalui oleh 3 sungai besar, seperti Sungai Indragiri, Sungai Gaung, dan Sungai Reteh yang semuanya bermuara ke Selat Malaka. Wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir memiliki garis pantai yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 339,5 km. Di sepanjang garis pantai ini terdapat Ekosistem Mangrove yang menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut. Kondisi geografis ini menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beragam, terutama di sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan.

- **Kondisi Demografi**

  Kabupaten Indragiri Hilir memiliki jumlah penduduk sebesar 703.245 jiwa (Sensus Penduduk 2020). Penduduk tersebar di 20 kecamatan dengan kepadatan penduduk rata-rata 80 jiwa/km2. Dintara kecamatan yang ada, Kecamatan Tembilahan memiliki kepadatan penduduk tertinggi yakni 1.032 jiwa/km2, sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) dengan 22 jiwa/km2.

  Sebagian besar penduduk Kabupaten Indragiri Hilir bermata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Sekitar 35% penduduk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, 25% di sektor perikanan dan kelautan, serta 20% di sektor kehutanan dan industri pengolahan hasil hutan.

  Dari segi sebaran wilayah, sekitar 42% penduduk Kabupaten Indragiri Hilir tinggal di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir umumnya menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut, termasuk hasil tangkapan ikan, udang, kepiting, dan biota laut lainnya. Keberadaan ekosistem mangrove yang lestari menjadi penting bagi keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir masih tergolong rendah. Sekitar 35% penduduk hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar, sedangkan 25% penduduk tidak menyelesaikan pendidikan formal.

Kondisi demografi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya pengelolaan dan konservasi ekosistem mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir. Keterlibatan dan peran serta masyarakat, terutama masyarakat pesisir, menjadi kunci keberhasilan upaya tersebut.

- **Potensi Sumber Daya Alam**
  Kabupaten Indragiri Hilir memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam, baik di wilayah daratan maupun wilayah pesisir dan lautan. Beberapa potensi sumber daya alam utama di wilayah ini antara lain:

  Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
  - Perairan laut dengan panjang garis pantai lebih kurang 339,5 km
  - Ekosistem mangrove seluas ribuan hektar
  - Potensi perikanan tangkap di laut dan perairan umum
  - Potensi budidaya perikanan tambak, keramba jaring apung, dan kolam

  Sumber Daya Pertanian dan Perkebunan
  - Lahan pertanian dan perkebunan yang subur
  - Komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, sagu, dan padi
  - Potensi pengembangan tanaman pangan dan hortikultura

  Sumber Daya Kehutanan
  - Hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar
  - Potensi hasil hutan kayu dan non-kayu
  - Keanekaragaman hayati yang tinggi

  Sumber Daya Energi dan Mineral
  - Cadangan minyak bumi dan gas alam
  - Potensi pengembangan energi terbarukan (biomassa, surya, angin)
  - Bahan galian seperti pasir, kerikil, dan tanah liat

  Sumber Daya Air
  - Sungai-sungai besar seperti Sungai Indragiri dan Sungai Gaung
  - Potensi pengembangan irigasi untuk pertanian
  - Sumber air baku untuk air minum dan industri

Hasil Asesmen

- **Luasan Dan Sebaran Mangrove**
  Dalam dokumen Riau Hijau, luas hutan mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 1990 seluas 112.568 hektar yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan. Tahun 2019, luas mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir menyusut hingga tersisa 95.608 hektar. Terjadi pengurangan tutupan hutan mangrove seluas 16.960 hektar dalam kurun waktu 29 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Fitriansyah et al., (2017), saat ini kawasan hutan mangrove di Indragiri Hilir seluas 65.534 hektar.

  Dari hasil asesmen lapangan dan analisis citra satelit, diketahui bahwa Kabupaten Indragiri Hilir memiliki ekosistem mangrove yang cukup luas. Total luasan mangrove di wilayah ini diperkirakan mencapai 67.234 hektar. Sebaran mangrove terkonsentrasi di sepanjang garis pantai dengan pola yang tidak merata.

Kecamatan yang memiliki luasan mangrove terluas adalah Kecamatan Gaung Anak Serka dengan 19.875 hektar, diikuti oleh Kecamatan Gaung (15.328 hektar), Kecamatan Kateman (10.457 hektar), dan Kecamatan Mandah (8.962 hektar). Sementara itu, kecamatan dengan luasan mangrove terkecil adalah Kecamatan Tanah Merah dengan 987 hektar. Secara umum, sebaran mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dibagi menjadi tiga wilayah utama, yaitu :

Wilayah Utara (Kecamatan Tanah Merah dan Kuala Indragiri)

a) Mangrove tumbuh di sepanjang garis pantai dan muara sungai
b) Luasan mangrove relatif kecil dan terpencar-pencar

Wilayah Tengah (Kecamatan Kateman, Gaung, dan Mandah)

a) Mangrove tumbuh membentuk hamparan yang cukup luas
b) Terdapat di sepanjang garis pantai dan muara sungai besar

Wilayah Selatan (Kecamatan Gaung Anak Serka dan Pelangiran)

a) Memiliki hamparan mangrove terluas di wilayah pesisir
b) Mangrove tumbuh di sepanjang garis pantai dan muara sungai

Peta sebaran mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan hasil asesmen dapat dilihat pada peta berikut ini (Lampirkan peta sebaran mangrove). Luasan dan sebaran mangrove yang cukup luas ini menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya mangrove yang besar. Namun, kondisi mangrove serta perkebunan kelapa masyarakat yang rusak cukup besar seperti di Desa Tanjung Lajau Kecamatan Kuala Indragiri, memiliki lasan dengan status APL lebih kurang 20.000 Ha yang terdiri dari mangrove dengan luas lebih kurang Kawasan khusus Manghrove lebih kurang 10.000 Ha. Desa Tanjung Lajau juga daerah dengan luas mencapai 20.000 Ha namun dari luasan yang ada, perkebunan kelapa yang rusaknya mencapai 10.000 Ha. Kondisi senada juga terjadi di Desa Sungai Buloh, Desa Tanjung Pasir, dan Desa Sungai Laut. Sementara itu Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa Sungai Buloh dan Kepala Desa Tanjung Lajau sangat berharap untuk direstorasi dan dikelola kawasan mangrove maupun kawasan perkebunan kelapa masyarakat seluas lebih kurang 20.000 Ha.

- **Manfaat ekosistem mangrove (ekonomi, ekologi, sosial budaya)**
  Manfaat Ekosistem Mangrove
  Manfaat Ekonomi
  a) Sumber hasil tangkapan perikanan (ikan, udang, kepiting, kerang) yang bernilai ekonomi tinggi
  b) Bahan baku untuk industri pengolahan hasil laut
  c) Sumber bahan baku kayu bakar dan bahan bangunan
  d) Potensi untuk ekowisata mangrove dan wisata bahari
  Manfaat Ekologi
  a) Sebagai sumber penyedia nutrisi untuk ekosistem perairan Pantai atau pesisir
  b) Tempat pemijahan dan asuhan bagi biota laut
  c) Pelindung garis pantai dari abrasi dan intrusi air laut
  d) Penyangga perubahan iklim dan penyerapan karbon
  e) Sebagai habitat untuk beragam satwa seperti burung, mamalia, reptile dan lainnya
  Manfaat Sosial Budaya
  a) Sumber mata pencaharian nelayan dan pembudidaya
  b) Sumber pangan bagi masyarakat pesisir
  c) Sarana pendidikan dan penelitian lingkungan
  d) Memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat
  e) Menjadi identitas wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir

Secara umum, ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam mendukung penghidupan masyarakat pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir. Sekitar 40% masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya pada hasil laut dan sumber daya mangrove.

- **Permasalahan dan Ancaman Terhadap Ekosistem Mangrove**
  Meskipun memiliki luasan yang cukup besar, ekosistem mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi berbagai permasalahan dan ancaman yang dapat mengancam kelestariannya. Berikut beberapa ancaman dan penyebab kerusakan ekosistem mangrove hasil asesmen di beberapa desa yang dikunjungi :

  Alih Fungsi Lahan
  Alih fungsi lahan mangrove menjadi pertambakan, pemukiman, dan kawasan industri masih menjadi ancaman utama. Sekitar 12% luas mangrove telah dikonversi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terutama di wilayah pesisir Kecamatan Kuala Indragiri dan Kecamatan Kateman.

  Pencemaran Lingkungan
  Pencemaran dari limbah domestik, pertambakan (tambak udang), kegiatan industry panglong arang, sedimentasi dan lainnya merupakan fakor-faktor penyebab kerusakan ekosistem mangrove.

  Eksploitasi Berlebihan
  Penebangan liar mangrove untuk kayu bakar atau pembuatan arang dan bahan bangunan untuk secrocok (pondasi bangunan gedung dan jembatan) masih terjadi di beberapa lokasi, termasuk di desa-desa yang dikunjungi.

  Perubahan Iklim
  Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim dapat mengancam keberlangsungan ekosistem mangrove di wilayah pesisir. Beberapa lokasi mangrove telah mengalami genangan permanen bahkan sampai ke daratan hingga keperkebunan kelapa masyarakat seperti di Desa Tanjung Lajau dan beberapa desa lainnya.

  Rendahnya Kesadartahuan Masyarakat
  Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian mangrove menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan ekosistem ini. Hal ini disebabkan pula keterbatasan matapencaharian sehingga potensi yang (mangrove) dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

  Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Pendanaan
  Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan pendanaan yang memadai untuk kegiatan konservasi mangrove menjadi tantangan tersendiri. Ini terbuktinya minimnya pemerintah desa mendapatkan dukungan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Namun secara umum, minimnya informasi dan sosialisasi hingga ke pelosok negeri terpencil terhadap dampak kerusakan ekosistem mangrove kehidupan sosial ekonomi mereka.

Kesimpulan :

Ekosistem mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki manfaat yang sangat penting bagi aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya masyarakat. Sekitar 40% masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya pada sumber daya mangrove dan hasil laut. Namun demikian, ekosistem mangrove menghadapi berbagai ancaman seperti konversi lahan, pencemaran lingkungan, eksploitasi berlebihan, perubahan iklim, serta rendahnya kesadartahuan masyarakat.

Dari hasil asesmen yang dilakukan maka kedepannya diperlukan upaya terpadu secara kolaboratif dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan dan ancaman tersebut. Dukungan dari Pemda

sangatlah diperlukan untuk adanya payung hukum dalam penyelamatan dna pengelolaan hutan mangrove yang tersisa. Selain itu, penegakan hukum juga perlu dioptimalkan terutama bagi pengambilan kayu mangrove secara illegal dan untuk kebutuhan industry atau skala besar. Perlunya sosialisasi dan pendampingan dari pihak terkait dalam peningkatan kesadartahuan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

Agar semua itu bisa berjalan, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir perlu didorong dan disupport oleh semua pihak baik itu Pemda, swasta, kelompok masyarakat dan lainnya. Dan tak kalah pentingnya adalah adanya dukungan dana atau anggaran yang memadai menjadi kunci utama untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir. Pelibatan masyarakat, penegakan hukum, dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan upaya pengelolaan dan konservasi ekosistem mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir.

Lampiran : DOKUMENTASI ASESMEN & KUNJUNGAN LAPANGAN

Tembilahan 13/5/2024) pertemuan dan diskusi dengan Penghulu Desa Bakau Aceh Rudi , Kec. Mandah dengan Tim Survey Desa Potensi Bakau, PIAPS, Hutan Rusak di beberapa desa potensi Mangrove di Kedai Kopi Wisata, Tembilahan. Memastikan peta wilayah dan desa-desa yang akan dikunjungi dan potensi Mangrove dan Potensi PIAPS. (Desa Pelanduk, Bantayan, Bakau Aceh)

Diskusi potensi Mangrove dan potensi Perhutanan Sosial (skema Hutan Desa) di Desa Bentek, Kecatan Mandah bersama Pak Penghulu Desa Bentek.

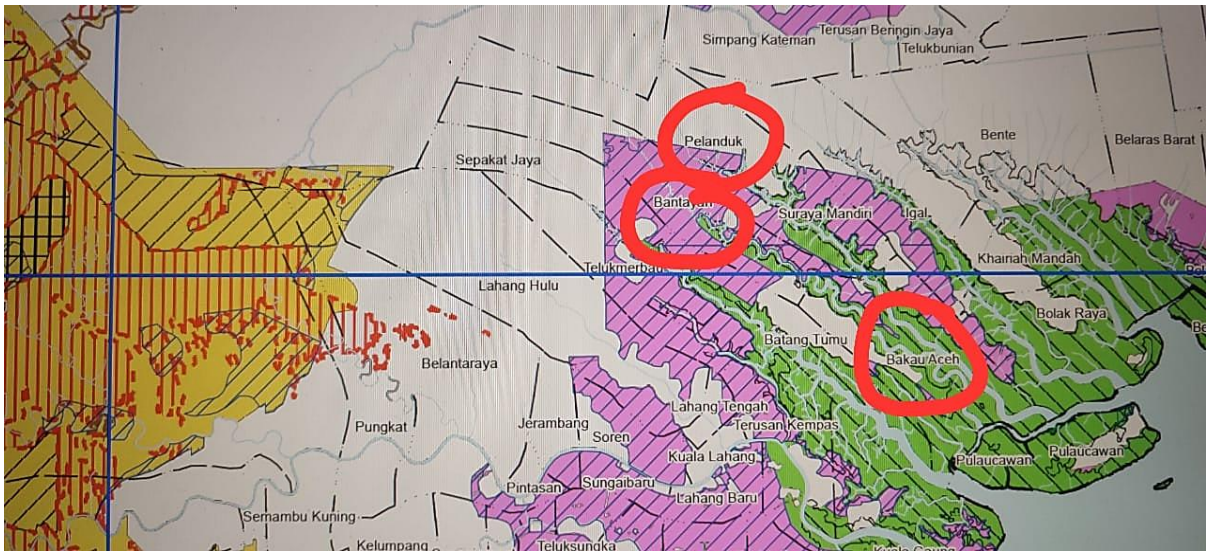

Asesmen dan diskusi dengan Kepala Desa Bakau Aceh beserta perangkat desa tentang kondisi Hutan Mangrove, peluang dan potensi ekonomi serta hambatan atau tantangan dalam pengelolaan ekosistem Mangrove serta peluang Perhutanan Sosial.

Asesmen dan diskusi dengan Kepala Desa Pelanduk beserta perangkat desa tentang kondisi Hutan Mangrove, peluang dan potensi ekonomi serta hambatan atau tantangan dalam pengelolaan ekosistem Mangrove dan peluang Perhutanan Sosial.

Asesmen dan diskusi dengan Kepala Desa Bantayan beserta perangkat desa tentang kondisi Hutan Mangrove, peluang dan potensi ekonomi serta hambatan atau tantangan dalam pengelolaan ekosistem Mangrove dan peluang Perhutanan Sosial.

Tembilahan (15/05/2024) Diskusi dengan Kepala Tanjung Lajau dan melakukan asesmen dan pemetaan tentang kondisi Hutan Mangrove, dan hutan yang rusak parah akibat abrasi, subsidensi peluang dan potensi ekonomi serta hambatan atau tantangan dalam pengelolaan ekosistem Mangrove dan potensi PIAPS.

Tanjung Lajau merupakan desa memproduksi kelapa terbesar di Inhil bahkan Riau. Sedangkan kawasan perkebunan kelapa yang rusak kebun kelapa rusak itu luasanya mencapai 10.000 Ha. Yang didorong untuk PS ada di daerah pesisir atau pinggir pantai luasannya lebih kurang Rp5. 000 Ha.

EIGER

Kunjungan ke salah satu dusun yakni Dusun 6 di Desa Tanjung Lajau dan diskusi dengan Pak RW tentang kondisi tanaman dan perkebunan kelapa berusia ratusan tahun mengalami rusak raparah karena terendam air asin akibat bobolnya tanggul.

Dulu perkebunan masyarakat pernah dibantu dan dikelola bersama PT SNI sistem plasma untuk peningkatan hasil perkebunan kelapa dan komitmen untuk pembelian kelapa masyarakat dengan harga kompetitif untuk jangka waktu 20 tahun. Namun, tanpa sebab yang jelas perusahaan tersebut meninggalkan perkebunan masyarakat sebelum batas waktu kerjama (sepakat 20 tahun) belum tuntas. Dan lebih kurang 10 tahun terakhir perkebunan masyarakat tersebut terbengkalai, rusak, dan mati. Akhirnya masyarakat di dusun yang tediri dari 220 KK tersebut hanya menggantungkan nasib dan mata pencaharian mereka dari pemanfaatan daun pucuk Nipah dan lidi Nipah, dan menangkap ikan.

Diskusi dan komunikasi dengan Kepala Desa Sungai Buluh dan Kepala Desa Tanjung Lajau terkait rencana merestorasi dan pengelolaan kawasan perkebunan kelapa masyarakat seluas lebih kurang 20.000 Ha di dua Desa yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri tersebut,.